

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN FASILITAS PARIWISATA DI KABUPATEN ACEH TAMIANG

Rabiatul Adawiyah, Nazaruddin, Rasyidin

Prodi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaeih

Jln. Tengku Chik diTiro, No. 26, Lancang Garam, Lhokseumawe-24351

Korespondensi: e-mail: Rabiatuladawiyah2552@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengembangan fasilitas pariwisata di Kabupaten Aceh Tamiang serta menganalisis hambatan apa saja yang dihadapi Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Aceh Tamiang dalam mengimplementasikan kebijakan pengembangan fasilitas objek wisata Kabupaten Aceh Tamiang. Penelitian ini dilakukan di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dan dipusatkan pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tamiang. Alasan peneliti memilih lokasi Aceh Tamiang karena di Aceh Tamiang memiliki keunikan dibidang pariwisatanya yang tidak dimiliki di daerah lain. Namun sangat disayangkan masih banyak objek wisata yang belum optimal dalam mengembangkan fasilitas pariwisatanya, sehingga banyak wisatawan yang enggan kembali ke tempat wisata tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pengembangan fasilitas pariwisata di Kabupaten Aceh Tamiang belum optimal. Dapat dilihat dari variabel sumber daya yang masih terbatas, baik itu sumber daya finansial maupun sumber daya manusianya. Dari segi sikap pelaksana (Disposisi) juga belum sepenuhnya mendukung implementasi kebijakan pengembangan fasilitas pariwisata di Kabupaten Aceh Tamiang. Dalam variabel komunikasi sudah berjalan baik antar dinas pariwisata dan dengan masyarakat, namun koordinasi dengan dinas lain masih belum berjalan optimal karena belum ada sinkronisasi program antar instansi. Bila dilihat dari variabel struktur birokrasinya sudah baik karena sudah terdapat SOP dalam melaksanakan tugasnya masing-masing.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pengembangan Fasilitas, Pariwisata

Pendahuluan

Sektor Pariwisata merupakan salah satu sektor yang potensial untuk dikembangkan agar menjadi salah satu sumber pendapatan daerah serta usaha memperbesar pendapatan asli daerah (PAD). Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.508 pulau atau disebut juga sebagai negara maritim yang terdapat banyak objek wisata. Pariwisata dipandang mempunyai peran penting dari rangkaian suatu proses pembangunan dilihat dari segi ekonomi, sosial dan budaya.

Dasar dari pengembangan pariwisata yaitu perencanaan, pengembangan dan arah pengelolaan. Secara sistematis pembangunan pariwisata dan arah pengelolaannya sangat membutuhkan perhatian pemerintah. Hadirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisata menjadi landasan hukum untuk mengoptimalkan pengembangan potensi wisata. Untuk menciptakan keamanan serta kenyamanan kepada wisatawan, pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting.

Selain itu juga, semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata pada tanggal 16 Januari 2009, maka pada prinsipnya keseluruhan kebijakan dalam penyelenggaraan kepariwisataan di Indonesia harus mendasarkan diri pada prinsip dan kaidah yang terdapat pada undang-undang kepariwisataan tersebut beserta segenap peraturan perundangan pelaksanaannya.

Secara garis besar, bentuk implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam mengembangkan pariwisata adalah menyediakan infrastruktur, menyediakan berbagai fasilitas, melakukan pengawasan antara aparat pemerintah dengan pihak wisata, baik dari segi pengaturannya dan promosi keluar daerah maupun ke luar negeri.

Provinsi Aceh adalah salah satu dari beberapa provinsi di Indonesia yang memiliki keindahan alamnya yang sangat beragam. Salah satu daerah provinsi Aceh yang memiliki beberapa objek wisata yang menarik yaitu Kabupaten Aceh Tamiang. Kabupaten ini memiliki beberapa pesona wisata alam terbuka yang masih sangat alami. Selain memiliki sumber daya pariwisata berupa pesona alam baik pesisir, daratan maupun pegunungan, Aceh Tamiang juga memiliki potensi seni budaya dan situs-situs sejarah yang kini masih terawat dengan baik.

Tidak aneh bila banyak wisatawan lokal dan luar Tamiang yang masih penasaran dan saat ini mulai terlihat berbondong-bondong datang ke Kabupaten Aceh Tamiang hanya untuk sekedar menikmati keindahan alam. Namun sangat disayangkan, tidak semua wisatawan mengetahui semua destinasi menarik di Aceh Tamiang. Potensi wisata yang ada di kabupaten ini tersebar di dua belas kecamatan sejumlah 78 objek dengan rincian 36 daya tarik wisata alam, 28 daya tarik budaya/sejarah dan 14 daya tarik wisata buatan yang patut untuk dikembangkan.

Pengembangan pariwisata di Kabupaten Aceh Tamiang dipayungi dalam Qanun Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kepariwisata Kabupaten Aceh Tamiang. Qanun tersebut merujuk pada UU Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata. Dalam pasal 8 Qanun tersebut menjelaskan bahwa pembangunan kepariwisataan Kabupaten Aceh Tamiang meliputi: pembangunan industri pariwisata, pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran, serta pembangunan kelembagaan kepariwisataan. Pembangunan industri pariwisata meliputi pembangunan struktur industri pariwisata, daya saing produk pariwisata, kemitraan usaha pariwisata, kredibilitas bisnis, serta tanggung jawab terhadap lingkungan alam, dan sosial budaya.

Namun sampai saat ini pembangunan pariwisata di Kabupaten Aceh tamiang belum berjalan dengan optimal. Berdasarkan data objek wisata di Kabupaten Aceh Tamiang tahun 2019,

banyak pengelolaan wisata di berbagai tempat objek wisata belum memiliki fasilitas lengkap dan fasilitas yang ada tidak terawat serta beberapa potensi-potensi wisata yang ada belum dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata. Dalam menghadapi kondisi tersebut seharusnya Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang yang diwakili Dinas Pariwisata yang menjalankan fungsi pengembangan kepariwisataan Kabupaten Aceh Tamiang cepat tanggap dalam menyikapi hal tersebut. Dalam hal ini MCK atau toilet umum adalah sarana vital yang seharusnya disediakan di tempat objek wisata.

Tidak hanya itu pemerintah juga harus memperhatikan fasilitas kebersihan seperti tempat pembuangan sampah dan lainnya. Agar para wisatawan tetap dapat menjaga kelestarian alam dan kebersihan di tempat objek wisata. Seperti yang terjadi pada objek wisata Air Terjun Sangka Pane dimana tidak tersedianya tempat pembuangan sampah dan tidak dijaga kebersihannya sehingga banyak sampah yang berserakan disekitar objek wisata dan menyebabkan hilangnya keindahan panorama objek wisata tersebut.

Berdasarkan hasil observasi awal penulis dengan Kadis Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tamiang, bahwa fasilitas Objek wisata di Aceh Tamiang ini belum memadai karena sebagian besar objek wisata alam di Aceh Tamiang masih sangat natural dan sama sekali belum pernah mendapat sentuhan pemerintah. Sehingga untuk mengembangkan objek wisata tersebut membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.(wawancara awal, pada tanggal 30 Juli 2021).

Dalam kenyataan di lapangan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang juga terkesan kurang memprioritaskan pengembangan sektor pariwisatanya. Dapat dilihat dari tidak dimasukkannya sektor pariwisata ke dalam isu-isu prioritas pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2017-2022. Para pengambil kebijakan masih melihat secara aspek politis dan belum menyadari potensi ekonomi dari objek wisata. Hal ini mendapat komentar dari Komisi III DPRK Aceh Tamiang, Desi Amelia, yang pesimis dengan kemajuan sektor pariwisata di Aceh Tamiang. Sebab pola pengembangan objek wisata jalan di tempat, tidak terpusat alias masih 'mincla-mincle' (sana-sini). (berita online rakyat aceh, 2020).

Padahal jika Pemda Aceh Tamiang serius dalam mengembangkan sektor pariwisata tentu akan menjadikan program wisata sebagai industri bagi kabupaten ini, dan dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi berkepanjangan. Misalnya dengan majunya semua objek wisata tentu banyak membuka lapangan pekerja bagi daerah objek wisata tersebut seperti menjual makanan dan minuman, juru parkir, dan ada pendapatan asli daerah. Akan tetapi kalau pariwisata ini tidak menjadi tempat sentral yang menguntungkan secara ekonomi, maka terjadilah stagnasi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).Berdasarkan fenomena di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang implementasi kebijakan Pemda Aceh Tamiang dalam pengembangan

pariwisata serta untuk memahami faktor apa saja yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan Pemda Kabupaten Aceh Tamiang dalam pengembangan objek wisata.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan Pemda Kabupaten Aceh Tamiang dalam pengembangan fasilitas objek wisata Kabupaten Aceh Tamiang?
2. Hambatan apa sajakah yang dihadapi Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Aceh Tamiang dalam mengimplementasikan kebijakan pengembangan Objek wisata Kabupaten Aceh Tamiang?

Landasan Teori

Teori merupakan landasan yang teramat penting dalam memahami, menafsirkan dan memaknai data, oleh karena itu untuk memudahkan penafsiran data dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa teori sebagai berikut:

Kebijakan Publik

William N. Dunn (dalam Herabudin, 2016: 38), mengatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain. Sedangkan Thomas R. Dye (dalam Nugroho, 2004: 185), mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dye mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya (objektifnya) dan kebijakan publik itu meliputi semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja.

Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Abdul Wahab, 2006: 65), implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu/ pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Pengertian implementasi kebijakan menurut Edward III adalah sebagai berikut:

“ policy implementation as we have seen is the stage of policy making between the establishment of a policy such as the passage of a legislative act, the issuing of an executive order, the handing down of a judicial decision, or the promulgation of a regulatory rule and the consequences of the policy for the people whom it affects”. (Edward III., 2002:1).

Jadi implementasi itu merupakan tindakan- tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut agar bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.

Indikator Implementasi Kebijakan

Berdasarkan pengertian implementasi kebijakan yang telah dipaparkan di sub bab sebelumnya, maka George Edward III (2002:10) mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan yang dijelaskan oleh Edward III dalam buku *Implementing Public Policy* dapat dipengaruhi oleh faktor- faktor diatas.

Konsep Pengembangan Pariwisata

Pariwisata menurut UU No.10 Tahun 2009 adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusaha, daya tarik dan atraksi wisata serta usaha-usaha yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata. Pengembangan pariwisata merupakan salah satu usaha untuk mempromusikan daya tarik suatu objek wisata agar menjadi berkembang sesuai dengan visi dan misi. Pengembangan pariwisata hendaknya tidak terlepas dari arah pengembangan kebudayaan nasional indonesia. Dengan kata lain, dalam keadaan nasional itulah hendaknya terletak landasan bagi kebijakan pengembangan pariwisata. Kementerian kebudayaan dan pariwisata RI menyatakan sebagai visinya bahwa pembangunan kebudayaan bangsa, meningkatkan peradaban dan persatuan bangsa, serta meningkatkan persahabatan antarnegara.

Metode

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis, karena persoalannya sangat komprehensif, mendalam dan sangat luas. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil dan Pembahasan

Sumber daya yang dibutuhkan dalam implementasi kebijakan pengembangan fasilitas pariwisata di Kabupaten Aceh Tamiang adalah sumber daya finansial dan sumber daya manusia. Sumber daya finansial bersumber dari APBD dan DAK dengan jumlah dana yang terbatas untuk kemajuan pengembangan fasilitas pariwisata di Kabupaten Aceh Tamiang. Anggaran yang ditujukan untuk sektor pariwisata terbatas karena pariwisata tidak termasuk dalam sektor prioritas RPJMD Kabupaten Aceh Tamiang. Pada tahun 2020 karena dalam situasi pandemi Covid-19, dana difokuskan untuk penanganan Covid-19.

Dari segi sumber daya manusia, sedikit pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan pariwisata (min. D-III pariwisata) sehingga mempengaruhi kemampuan pegawai dalam melaksanakan pengembangan pariwisata. Terjadinya mutasi pegawai menjadi salah satu faktor keterbatasan SDM dengan latar belakang pendidikan pariwisata di Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tamiang.

Pengembangan fasilitas pariwisata di Kabupaten Aceh Tamiang bersifat multistakeholder. Adapun pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan fasilitas pariwisata ini adalah Dinas Pariwisata, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Aceh Tamiang, Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang, Disperindagkop, Dishub, DPMPKB, Perangkat Kampung, Dinas Lingkungan Hidup, Camat, dan BPBD.

Komunikasi antarpelaksana di lingkup Dinas Pariwisata dan komunikasi serta koordinasi dengan masyarakat sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi koordinasi dengan dinas lain masih belum berjalan dengan baik. Skema kerja mengenai pengembangan sudah diketahui oleh masing-masing organisasi perangkat daerah. Akan tetapi ditemukan kendala dalam hal sinkronisasi program karena dibatasi oleh tugas pokok instansi di wilayah lain dan instansi yang fokus pada program dan restranya masing-masing. Selain itu, pelaksanaan koordinasi belum maksimal karena keterbatasan anggaran.

Sedangkan sikap para aktor kebijakan dalam implementasi kebijakan pengembangan fasilitas pariwisata di Kabupaten Aceh Tamiang masih belum sepenuhnya mendukung implementasi kebijakan pengembangan fasilitas pariwisata di Kabupaten Aceh Tamiang. Respon pelaksana terhadap kebijakan adalah positif dengan alasan untuk kemajuan daerah dan sudah menjadi tanggung jawab yang harus dilaksanakan.

Pegawai memiliki kemauan, akan tetapi karena kemampuan pegawai yang masih kurang dan terbatasnya pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidangnya, maka mempengaruhi ketanggapan dalam melaksanakan tugasnya, dalam hal ini pegawai masih bergantung pada arahan dan pendampingan dari Kepala Dinas. Sementara itu, instansi lain yang terlibat menyatakan responnya yaitu setuju dan berkomitmen. Namun aktivitas

yang mendukung implementasi kebijakan pengembangan fasilitas pariwisata di Kabupaten Aceh Tamiang dibatasi oleh anggaran.

Adapun hambatan yang dihadapi Dinas Pariwisata, Pemuda, Dan Olahraga Kabupaten Aceh Tamiang dalam mengimplementasikan kebijakan pengembangan objek wisata Kabupaten Aceh Tamiang yaitu keterbatasan Anggaran dan Belum Ada Sinkronisasi Program Antar Instansi, belum adanya perizinan pembangunan wisata di kawasan hutan dan kurangnya integrasi pelaksana dalam pengembangan fasilitas pariwisata di Kabupaten Aceh Tamiang.

Kesimpulan

Anggaran yang ditujukan untuk sektor pariwisata terbatas karena pariwisata tidak termasuk dalam sektor prioritas RPJMD Kabupaten Aceh Tamiang. Pada tahun 2020 karena dalam situasi pandemi Covid-19, dana difocusing untuk penanganan Covid-19. Dari segi sumber daya manusia, sedikit pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan pariwisata (min. D-III pariwisata) sehingga mempengaruhi kemampuan pegawai dalam melaksanakan pengembangan pariwisata.

Komunikasi antar pelaksana di lingkup Dinas Pariwisata dan komunikasi serta koordinasi dengan masyarakat sudah berjalan dengan baik, namun koordinasi dengan dinas lain masih belum berjalan dengan baik. Sedangkan sikap para aktor kebijakan dalam implementasi kebijakan pengembangan fasilitas pariwisata di Kabupaten Aceh Tamiang masih belum sepenuhnya mendukung implementasi kebijakan pengembangan fasilitas pariwisata di Kabupaten Aceh Tamiang.

Hambatan dalam Implementasi Kebijakan Pengembangan Fasilitas Pariwisata di Kabupaten Aceh Tamiang antara lain keterbatasan Anggaran dan Belum Ada Sinkronisasi Program Antar Instansi, belum adanya perizinan pembangunan wisata di kawasan hutan dan kurangnya integrasi pelaksana dalam pengembangan fasilitas pariwisata di Kabupaten Aceh Tamiang

Daftar Pustaka

- Edward III, George C. 2002. *Model Pendekatan Implementasi*. Congresinal: Quartely Press.
- Herabudin. 2016. *Studi Kebijakan Pemerintah Dari Filosofi Ke Implementasi*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Nugroho, D. Riant. 2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo.
- Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kepariwisataaan Kabupaten Aceh Tamiang.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan.
- Wahab, Solichin Abdul. 2006. *Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yoeti, Oka A. 2006. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung: Angkasa.